



Polemik Pendidikan di Indonesia antara Hak Rakyat dan Tanggungjawab Negara

The Education Polemic in Indonesia between the People's Right and the State's Responsibility

Author:

Ahmad Fadlil
Mahrowi

Afiliation

Universitas Islam
Negeri Sunan
Kalijaga, Yogyakarta

***Email:**

mhfadlil24@hmail.com

Dates:

Submitted: 11/11/2025

Revised: 11/12/2025

Accepted: 23/12/2025

DOI :

[10.62282/je.v3i1.13-32](https://doi.org/10.62282/je.v3i1.13-32)

License: EDUCATUM.

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
Share Alike 4.0
International License



Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan, dan dicantumkan dalam sila kedua serta kelima Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam praktiknya, akses dan kualitas Pendidikan di Indonesia masih menghadapi persoalan serius, diantaranya angka putus sekolah yang tinggi, fasilitas yang belum memadai, biaya yang memberatkan masyarakat dan lain sebagainya. Pemerintah negara di era presiden Prabowo Subianto sekarang ini membuat program antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan yang terbaru presiden menurunkan dana untuk memberikan Smart TV di setiap kelas sebagai upaya pemerintah menutup berbagai kesenjangan tersebut. Artikel ini bertujuan mengkaji hubungan antara konsep Pendidikan dalam perspektif Pancasila serta yang dicita-citakan UUD 1945 dengan kebijakan aktual yang sedang dilakukan pemerintah, sekaligus mengkritisi pertanyaan fundamental: Pendidikan sejatinya tanggung jawab pemerintah atau rakyat? Dengan pendekatan normatif dan menggunakan analisis kebijakan.

Kata Kunci: ideologi pancasila; kebijakan pemerintah; kesenjangan; pendidikan Indonesia

Abstract

Education is a fundamental right of every citizen, as guaranteed in the Preamble to the 1945 Constitution of Indonesia “to educate the life of the nation” and in Article 31 paragraph (1), which states that every citizen has the right to education. This principle is also reflected in the second and fifth principles of Pancasila: just and civilized humanity, and social justice for all Indonesians. However, in practice, access to and quality of education in Indonesia remain problematic, marked by high dropout rates, limited facilities, and burdensome costs. Under President Prabowo Subianto’s administration, several programs have been introduced, such as Free Nutritious Meals (Makan Bergizi Gratis), Sekolah Rakyat, and the distribution of Smart TVs in classrooms, as efforts to reduce educational inequality. This article examines the relationship between the concept of education envisioned in Pancasila and the 1945 Constitution and the government’s current policies, while addressing a fundamental question: is education primarily the responsibility of the state or of the people? The study employs a normative approach and policy analysis framework.

Keywords: pancasila ideology; government policy; inequality; Indonesian education

PENDAHULUAN

Kemajuan sebuah negara sangat tergantung pada sistem pendidikannya, yang berperan sebagai dasar untuk mencetak generasi bangsa serta sumber daya manusia berkualitas yang mendukung kemajuan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, sistem pendidikan menghadapi berbagai tantangan kompleks, seperti masalah pada kurikulum, kualitas pendidik, kesetaraan akses pendidikan, serta fasilitas yang belum memadai. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional melalui pembaruan kebijakan, pembangunan fasilitas pendidikan, serta peningkatan kualitas guru. Meskipun ada kemajuan, masih terdapat kesenjangan signifikan antara harapan dan realita di lapangan (Kadi & Awwaliyah, 2017).

Saat ini Indonesia sedang masif melakukan upaya pembaruan di bidang pendidikan. Namun, langkah ini tidak selalu berjalan secara baik karena sering kali menimbulkan tantangan baru bagi para siswa dalam menjalani proses belajar. Pendidikan sejatinya berfungsi sebagai pelita yang menuntun manusia dalam menentukan arah hidup dan cita-cita, sekaligus menjadi pondasi bagi generasi mendatang. Akan tetapi, berbagai persoalan masih terus menghantui dunia pendidikan kita. Di antaranya, layanan pendidikan yang belum merata dan masih rendah kualitasnya, kualitas mutu pendidikan secara keseluruhan yang belum memadai, standar pendidikan tinggi yang masih jauh dari harapan, serta kemampuan literasi anak-anak Indonesia yang relatif lemah. Semua masalah ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan nasional masih menghadapi tantangan serius. Dampaknya pun langsung terasa pada kualitas lulusan, ketika mutu pendidikan rendah, sumber daya manusia yang dihasilkan juga tidak optimal.

Salah satu tantangan serius dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan akses dan tingginya angka anak yang berhenti/putus sekolah. Faktor ekonomi serta letak geografis menjadi penghambat utama bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka. Banyak anak dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di wilayah terpencil kesulitan untuk mengakses pendidikan formal disebabkan oleh keterbatasan dana penunjang dan fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Laporan Bank Dunia tahun 2023 menyebutkan sekitar 4,4 juta anak usia sekolah di Indonesia tidak dapat melanjutkan pendidikannya, mayoritas berasal dari keluarga miskin dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Kondisi ini memperparah ketidaksetaraan dalam akses pendidikan yang berdampak pada rendahnya kontribusi dan prestasi belajar anak-anak di wilayah tersebut. Data BPS tahun ajaran 2023/2024 juga menunjukkan bahwa angka putus sekolah masih cukup tinggi, dengan peningkatan di beberapa jenjang pendidikan, apalagi makin tinggi jenjangnya, makin banyak anak yang berhenti sekolah, terutama di daerah desa terpencil (Icha Saputri et al., 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-kritis. Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada analisis norma, nilai, dan kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam melihat relasi antara hak rakyat atas pendidikan dan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yang menempatkan pendidikan tidak hanya sebagai praktik sosial, tetapi juga sebagai konstruksi normatif dan ideologis yang harus dikaji secara kritis.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen normatif dan kebijakan negara, seperti UUD 1945, Pancasila, serta kebijakan pendidikan pemerintah yang meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan digitalisasi pendidikan melalui Smart TV. Data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan resmi lembaga negara dan organisasi internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu pendidikan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan analisis kebijakan (*policy analysis*). Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis dengan menelaah kesesuaian antara norma konstitusional dan implementasi kebijakan pendidikan di lapangan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi akademik dan dokumen resmi, sehingga menghasilkan analisis yang objektif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan dalam Nilai Pancasila

Pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai landasan ideologi, Pancasila memberikan arah dan makna bagi penyelenggaraan pendidikan agar menghasilkan manusia Indonesia yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berkarakter dan mempunyai moral yang kuat. Pendidikan dalam nilai Pancasila menanamkan lima prinsip dasar yang menjadi jati diri bangsa, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pertama, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa pendidikan harus memupuk penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai spiritual dan religiusitas dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tapi juga membimbing siswa untuk menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman agama dan kepercayaan sebagai bagian dari persatuan bangsa.

Kedua, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut agar pendidikan menanamkan sikap saling menghormati, menghargai hak asasi manusia, serta membangun karakter yang beradab, jujur, dan bertanggung jawab. Pendidikan yang berdasarkan nilai ini mengarah pada pembentukan generasi yang peka terhadap keadilan sosial dan kemanusiaan tanpa diskriminasi.

Ketiga, nilai Persatuan Indonesia sebagai unsur fundamental dalam Pancasila mengajak pendidikan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Melalui pendidikan, integrasi sosial dan harmonisasi antar suku, budaya, dan agama dapat diwujudkan sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. (purnomo, 2023)

Keempat, nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengarahkan pendidikan untuk mengajarkan demokrasi yang bermartabat, keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, serta sikap musyawarah dan mufakat. Hal ini penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya kritis dan kreatif, tetapi juga kooperatif dan bertanggung jawab secara sosial.

Kelima, nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut penyelenggaraan pendidikan yang adil dan merata. Pendidikan harus menjadi sarana pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini mengalami ketimpangan akses pendidikan (Aryani et al., 2022).

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan bukan hanya terjadi melalui kurikulum formal, tetapi juga melalui lingkungan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan interaksi sosial sehari-hari. Pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila menyiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga bermoral dan siap berkontribusi dalam membangun bangsa yang adil dan makmur.

Dalam praktiknya, implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan menghadapi tantangan seperti pergeseran budaya, upaya modernisasi yang kurang seimbang, dan masalah sosial seperti intoleransi. Oleh sebab itu, penguatan pemahaman dan internalisasi nilai Pancasila harus menjadi prioritas dalam setiap aspek pendidikan agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi (Lestari et al., 2021). Dengan demikian, pendidikan dalam nilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai fondasi untuk mencetak generasi penerus bangsa yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sekaligus menghadapi berbagai tantangan zaman modern.

Konflik Pendidikan di Indonesia

Tantangan Pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan kronis. Rendahnya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan menyebabkan kurangnya pembentukan karakter, seperti gotong royong dan tanggung jawab sosial, yang esensial untuk menciptakan generasi berideologi nasional (wahyuni, 2023). Di antara masalah Pendidikan yang masih serius sampai sekarang adalah ketidaksetaraan akses pendidikan antar daerah, terutama di wilayah terpencil, menyebabkan banyak anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa pada 2024, sekitar 1,5 juta anak usia sekolah tidak

bersekolah, dengan mayoritas berasal dari keluarga miskin (Kemendikbudristek, 2024). Anak-anak di wilayah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih mudah terjangkau terhadap sekolah unggul dan berkualitas dibandingkan anak-anak di daerah terpencil, terutama Kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Data Badan Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan, khususnya pada jenjang SMA/SMK. Akses kampung di pedesaan untuk menuju ke sekolah merupakan faktor terpenting dalam masalah ini. Anak-anak bahkan harus menyusuri hutan, menyeberangi sungai, hingga melewati jalanan berlumpur untuk menuju ke sekolah setiap harinya, karena akses yang masih sulit dijangkau inilah yang pada akhirnya menjadikan masyarakat kurang antusias untuk peduli terhadap Pendidikan (BPS, 2022).

Selain kesenjangan akses, masalah kualitas layanan Pendidikan yang belum merata. Terdapat banyak sekolah masih kekurangan sarana dan prasarana, seperti ruang kelas yang memadai, kamar mandi yang layak, perpustakaan, laboratorium, serta akses internet. Hal ini akan berdampak terhadap rendahnya mutu pembelajaran. Hasil *Programme for International Student Assessment (PISA)* sebelumnya tahun 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat 72 dari 79 negara dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains (OECD, 2018).

Data terbaru PISA 2022 bahkan menunjukkan penurunan skor literasi siswa Indonesia. Skor membaca turun menjadi 359, skor matematika menjadi 366, dan skor sains menjadi 383 (OECD PISA 2018). Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2018, sekaligus menjadi skor terendah sejak Indonesia ikut serta dalam PISA tahun 2000. Meski demikian, peringkat Indonesia secara global naik sekitar 5–6 posisi dibandingkan 2018 karena beberapa negara lain juga mengalami penurunan capaian (OECD, 2022). Fakta ini menunjukkan bahwa konflik pendidikan di Indonesia semakin kompleks, tidak hanya terkait ketersediaan fasilitas, tetapi juga kemampuan dasar siswa dalam literasi dan numerasi.

Standar pendidikan tinggi juga menjadi masalah yang masih timpang. Perguruan tinggi di kota besar umumnya memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan perguruan tinggi di daerah. Sehingga masyarakat daerah harus berusaha semaksimal mungkin dan menyiapkan biaya yang lebih besar untuk bisa melanjutkan Pendidikan tinggi ke kota besar dan universitas ternama. Kesenjangan ini berpengaruh pada daya saing lulusan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia (tilaar, 2002).

Biaya pendidikan masih menjadi faktor utama beban masyarakat. Meski pemerintah telah mengalokasikan bantuan dana seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar), banyak orang tua masih terbebani dengan biaya tambahan seperti seragam, buku, dan biaya masuk sekolah unggulan. Hal ini memberi pandangan kuat bahwa pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil. Dengan demikian, konflik pendidikan di Indonesia bukan hanya menyangkut soal teknis, melainkan juga persoalan struktural yang berakar pada kebijakan dan sistem manajemen pendidikan nasional.

Hak Rakyat dalam Pendidikan

Hak rakyat atas pendidikan merupakan hak asasi yang melekat sejak manusia lahir, karena pendidikan merupakan sarana utama bagi manusia untuk mengembangkan potensi, kesadaran moral, dan kemanusiaan. Dalam perspektif konstitusional, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Rumusan ini menempatkan pendidikan sebagai hak universal yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Namun, dalam realitas sosial, hak rakyat atas pendidikan belum terwujud secara penuh. Banyak masyarakat miskin yang masih kesulitan mengakses sekolah karena faktor biaya, jarak, dan kualitas fasilitas yang tidak merata. Ketimpangan ini menjadikan hak pendidikan di Indonesia bersifat formalistik, diakui secara hukum, tetapi belum dirasakan secara nyata oleh seluruh elemen masyarakat.

Dalam pandangan filsafat pendidikan, hak rakyat bukan hanya soal akses belajar, melainkan juga hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan membebaskan. Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* menegaskan bahwa pendidikan sejati adalah proses pembebasan dari struktur sosial yang menindas. Pendidikan yang hanya melahirkan kepatuhan tanpa kesadaran kritis tidak akan menciptakan masyarakat merdeka (Da Silva, 2021). Oleh karena itu, negara tidak cukup hanya membuka sekolah, tetapi harus memastikan bahwa pendidikan berfungsi sebagai ruang emansipasi, bukan sekadar reproduksi status sosial.

Hak rakyat atas pendidikan juga bersifat multidimensional. Pertama, hak moral, yakni hak untuk tumbuh menjadi manusia bermoral yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Kedua, hak sosial, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara adil melalui pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, hak ekonomi, yakni hak memperoleh kesejahteraan melalui kemampuan yang lahir dari pendidikan. Ketiganya saling terkait dan menjadi indikator utama keberhasilan sistem Pendidikan (mudyaharjo, 2019).

Dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, hak rakyat atas pendidikan harus berlandaskan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan bukan sekadar alat mobilitas sosial, tetapi sarana menanamkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu, pelaksanaan hak pendidikan yang sejati harus bersifat inklusif, berkeadilan gender, dan menghormati keberagaman budaya Indonesia.

Namun, hak rakyat sering kali tereduksi oleh mekanisme pasar dan birokratisasi kebijakan pendidikan. Misalnya, biaya pendidikan yang tinggi di sekolah dan perguruan tinggi negeri menjadikan hak belajar seolah hanya milik mereka yang mampu secara ekonomi. Paradigma pendidikan sebagai komoditas membuat negara terjebak dalam logika efisiensi dan kompetisi, bukan keberpihakan sosial. Dalam konteks inilah polemik muncul, rakyat memiliki hak, tetapi negara sering memandangnya sebagai beban anggaran, bukan sebagai investasi jangka Panjang.

Jika hak rakyat diabaikan, maka pendidikan akan kehilangan makna moralnya. Ia akan berubah menjadi alat reproduksi kekuasaan dan ketimpangan sosial. Oleh sebab itu, pembumian hak rakyat atas pendidikan harus ditempatkan sebagai dasar bagi seluruh kebijakan nasional, bahwa pendidikan adalah milik rakyat, bukan milik pemerintah atau lembaga tertentu. Pendidikan yang berpihak pada rakyat adalah pendidikan yang menghidupkan kesetaraan, membuka peluang, dan memuliakan martabat manusia Indonesia seutuhnya (nata, 2021).

Upaya Pemerintah

Berbagai tantangan struktural yang dihadapi Indonesia dalam sektor Pendidikan, pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah dengan program yang dicanangkan melalui program Presiden. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023, sekitar 27,6% anak Indonesia mengalami stunting, yang berdampak signifikan pada kemampuan kognitif dan

konsentrasi belajar (BPS, 2023). Masalah gizi buruk dan stunting menjadi penghambat utama anak dalam mencetak prestasi akademik. Kekurangan gizi menyebabkan anak-anak sulit berkonsentrasi, lelah, dan rentan terhadap penyakit, yang pada akhirnya meningkatkan resiko putus sekolah.

Dalam konteks pendidikan Pancasila, pendidikan bukan hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk karakter berlandaskan sila-sila Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu upaya pemerintah dan juga program unggulan presiden Prabowo dalam mengatasi hal ini adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025, dengan anggaran Rp. 71 triliun yang menasar 19,47 juta penerima manfaat, termasuk siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2025).

Dalam konteks ini, Program MBG hadir sebagai solusi yang tidak hanya menangani aspek fisik atau gizi, tetapi juga mendukung pendidikan karakter berbasis Pancasila. Isi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program Makan Bergizi Gratis, yang resmi diluncurkan pada Januari 2025, merupakan inisiatif unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui, dengan fokus utama pada peningkatan kesehatan dan prestasi akademik siswa.

Menurut laporan resmi, MBG menargetkan 19,47 juta penerima manfaat pada tahap awal, dengan anggaran Rp71 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2025 (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2025). Program ini mencakup penyediaan makanan sehat berbasis pangan lokal, seperti nasi, lauk protein (telur, ayam, ikan), sayuran, dan susu, yang disesuaikan dengan standar gizi nasional. MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga melibatkan pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah bekerja sama dengan UMKM, petani, dan nelayan untuk menyediakan bahan pangan, sehingga menciptakan efek berganda dalam perekonomian kerakyatan (pratama, 2025).

Selain itu, program ini menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, tidak mubazir, dan gotong royong dalam pelaksanaan program di sekolah-sekolah. Misalnya, siswa diajarkan untuk menghargai makanan yang diberikan dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan makan. Pelaksanaan MBG dilakukan secara bertahap, dimulai dari sekolah-sekolah di daerah prioritas dengan angka stunting tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Kalimantan Barat.

Efektivitas MBG dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari segi kesehatan, MBG telah menunjukkan dampak positif awal. Laporan pendahuluan dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa dalam tiga bulan pertama pelaksanaan (Januari-Maret 2025), tingkat kehadiran siswa di sekolah meningkat sebesar 15% di daerah percontohan, seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, karena anak-anak termotivasi oleh penyediaan makanan gratis (Kementerian Kesehatan, 2025). Peningkatan gizi juga membantu mengurangi kelelahan dan meningkatkan konsentrasi belajar, yang secara langsung mendukung prestasi akademik. Studi oleh Hidayat dan Pratama (2025) menemukan bahwa siswa yang menerima MBG menunjukkan peningkatan skor rata-rata dalam tes kognitif sebesar 10% dibandingkan kelompok kontrol. Kedua, MBG berkontribusi pada pemerataan pendidikan, yang sejalan dengan sila kelima Pancasila. Dengan menyoal anak-anak dari keluarga miskin, program ini mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Misalnya, di Kabupaten Timor Tengah Selatan, program ini berhasil menurunkan angka putus sekolah dari 8% pada 2024 menjadi 5% pada kuartal pertama 2025 (Kemendikbudristek, 2025). Ketiga, MBG memperkuat pendidikan Pancasila melalui pembentukan karakter. Kegiatan seperti berdoa bersama sebelum makan dan jadwal piket kebersihan di sekolah mengajarkan nilai-nilai gotong royong, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sumber daya (wahyuni, 2023).

Selain manfaat dan efektivitas, MBG juga menghadapi tantangan. Diantaranya pertama, distribusi makanan di daerah terpencil masih terkendala oleh infrastruktur logistik yang terbatas, seperti di Papua dan Kalimantan. Kedua, resiko penyimpangan anggaran, seperti korupsi atau mismanagement, menjadi ancaman terhadap keberlanjutan program. Laporan awal dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat adanya ketidaksesuaian distribusi di 5% sekolah percontohan pada 2025 (BPKP, 2025). Ketiga,

pelatihan guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan MBG masih minim, sehingga aspek pendidikan karakter belum sepenuhnya optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pengawasan, dan melatih guru dalam pendidikan karakter berbasis Pancasila.

Sejumlah sekolah di beberapa daerah terjadi Kasus keracunan massal pada program Makan Bergizi Gratis hingga menimbulkan keprihatinan publik. Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa justru menimbulkan dampak kesehatan yang serius. Peristiwa ini menunjukkan lemahnya pengawasan mutu pangan dan koordinasi antar instansi. Secara moral, hal tersebut melukai kepercayaan masyarakat, seharusnya negara memberikan prioritas utama terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak didik. Pemerintah perlu memperkuat fungsi kontrol agar program sosial tidak sekadar simbol politik, tetapi benar-benar berpihak pada kemanusiaan dan kualitas pendidikan.

Program Makan Bergizi Gratis mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam beberapa cara. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terwujud dalam upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar anak-anak melalui gizi yang memadai. Sila kelima, keadilan sosial, tercermin dalam pemerataan akses pendidikan melalui pengurangan beban ekonomi keluarga miskin. Selain itu, keterlibatan UMKM dan komunitas lokal dalam penyediaan pangan mencerminkan sila ketiga, persatuan Indonesia, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, melalui pendekatan partisipatif (pratama, 2025). Pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam MBG, seperti kebiasaan berdoa dan gotong royong, juga memperkuat identitas ideologis siswa sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan potensi besar sebagai solusi untuk masalah pendidikan di Indonesia, terutama dalam mengatasi stunting, meningkatkan kehadiran sekolah, dan memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila. Dampak awal, seperti peningkatan kehadiran dan prestasi akademik, menunjukkan efektivitas program ini. Namun, tantangan seperti distribusi di daerah terpencil, resiko korupsi, dan kurangnya pelatihan guru perlu segera diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas, pemerintah diharapkan untuk memperbaiki infrastruktur logistik di daerah tertinggal, memperkuat pengawasan anggaran melalui audit rutin, dan melatih guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila

dalam pelaksanaan MBG. Dengan implementasi yang lebih baik, MBG dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan yang inklusif dan bermartabat.

Selain program Makan Bergizi Gartis, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto juga meluncurkan Program Sekolah Rakyat dan penyaluran Smart TV ke sekolah-sekolah pada 2025. Program Sekolah Rakyat dan Smart TV dirancang untuk menangani tantangan Pendidikan dengan pendekatan inklusif dan berbasis teknologi, sekaligus memperkuat identitas ideologis berbasis Pancasila. Program Sekolah Rakyat, diluncurkan pada Juli 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan, menawarkan pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (Kementerian Sosial, 2025). Program ini mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan semua kebutuhan seperti seragam, makanan, dan asrama ditanggung negara. Hingga Juli 2025, 63 sekolah rintisan telah beroperasi di berbagai daerah, dengan rencana ekspansi ke 184 daerah, didukung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan fasilitas seluas 5-10 hektare per lokasi (Kementerian PUPR, 2025).

Seleksi siswa dilakukan ketat berdasarkan data kemiskinan dari BPS dan Kementerian Sosial, menargetkan anak-anak desil 1 / paling miskin untuk memastikan tepat sasaran (BPS, 2025). Kurikulum Sekolah Rakyat mengintegrasikan pendidikan formal nasional, keterampilan vokasional (seperti pertanian dan teknologi sederhana), dan pembinaan karakter. Kolaborasi dengan TNI untuk pelatihan disiplin, seperti baris-berbaris, memperkuat nilai-nilai Pancasila, terutama disiplin dan gotong royong (Kementerian Sosial, 2025). Program ini mencerminkan sila kelima Pancasila melalui pemerataan akses pendidikan dan sila kedua melalui pembentukan karakter kemanusiaan yang adil, mendukung visi Indonesia Emas 2045 (wahyuni, 2023).

Program penyaluran Smart TV ke sekolah-sekolah, yang dimulai Mei 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025, bertujuan mendigitalisasi pendidikan untuk meningkatkan akses ke pembelajaran berkualitas (Kemendikbudristek, 2025). Pemerintah menargetkan distribusi 330.000 unit layar digital pintar (interactive flat panel) hingga akhir 2025, mencakup 73% dari 450.000 sekolah di Indonesia, termasuk sekolah

negeri, swasta, dan Sekolah Rakyat. Hingga Oktober 2025, 10.000 sekolah telah menerima satu unit, dengan target 100.000 sekolah pada November 2025 (Komdigi, 2025). Setiap unit, bernilai Rp26 juta, mencakup pengiriman, asuransi, dan garansi, dengan total anggaran Rp7,9 triliun melalui penunjukan langsung kepada produsen seperti Hisense (Keppres Nomor 46 Tahun 2025). Smart TV memungkinkan pembelajaran jarak jauh dengan guru terbaik dari studio pusat, konten animasi interaktif, dan monitoring proses belajar, terutama di daerah 3T yang kekurangan guru. Program ini didukung infrastruktur internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), yang telah mencakup 38.000 titik sekolah (BAKTI, 2025). Dalam konteks Pancasila, Smart TV mendukung sila kelima dengan pemerataan akses pendidikan dan sila ketiga persatuan Indonesia melalui konten digital yang memperkuat keberagaman dan identitas nasional (Torro et al., 2023).

Efektivitas Program dalam Mengatasi Masalah Pendidikan pada Sekolah Rakyat menunjukkan efektivitas awal dalam mengurangi angka putus sekolah. Laporan pendahuluan Kementerian Sosial mencatat bahwa di 63 sekolah rintisan, tingkat kehadiran siswa mencapai 95% pada Agustus 2025, dengan 80% siswa menunjukkan peningkatan keterampilan dasar dalam tiga bulan pertama (Kementerian Sosial, 2025). Program ini juga berhasil menarik anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, seperti di Kabupaten Bima, di mana angka putus sekolah turun dari 7% pada 2024 menjadi 4% pada 2025 (Kemendikbudristek, 2025). Namun, tantangan meliputi keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil dan kebutuhan pelatihan guru untuk mengintegrasikan nilai Pancasila secara efektif.

Program Smart TV telah meningkatkan akses ke pembelajaran berkualitas di daerah 3T. Evaluasi awal menunjukkan bahwa sekolah-sekolah penerima Smart TV di Kalimantan Utara melaporkan peningkatan minat belajar siswa sebesar 20% berkat konten interaktif (hamzanwadi, 2025). Namun, program ini menuai kritik karena kurangnya transparansi dalam pengadaan barang dan prioritas anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah rusak (Komdigi, 2025). Selain itu, konektivitas internet yang tidak merata di beberapa daerah menghambat efektivitas penuh program ini. Kedua program saling melengkapi: Sekolah Rakyat memberikan akses fisik ke pendidikan, sementara Smart TV menyediakan konten berkualitas.

Dalam konteks Pancasila, Sekolah Rakyat memperkuat karakter melalui pembinaan langsung, sedangkan Smart TV mendukung pendidikan ideologi melalui media digital interaktif, seperti diskusi tentang keberagaman dan gotong royong (mindyasningrum, 2023)). Sekolah Rakyat mencerminkan sila kelima Pancasila dengan memastikan anak-anak miskin mendapatkan pendidikan gratis, serta sila kedua melalui pembentukan karakter kemanusiaan yang adil. Smart TV mendukung sila ketiga dan kelima dengan menyediakan akses pendidikan merata dan konten yang memperkuat persatuan nasional. Namun, tantangan seperti risiko korupsi pada pengadaan Smart TV dan keterbatasan infrastruktur Sekolah Rakyat perlu diatasi untuk memaksimalkan dampak ideologis dan praktis.

Program Sekolah Rakyat dan Smart TV menunjukkan potensi besar dalam mengatasi ketidaksetaraan pendidikan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila. Sekolah Rakyat berhasil meningkatkan akses bagi anak miskin, sementara Smart TV memperluas jangkauan pembelajaran berkualitas. Namun, tantangan seperti infrastruktur, transparansi anggaran, dan pelatihan guru harus segera ditangani. Maka pemerintah harus lebih mengoptimalkan masalah lanjut mengenai percepatan pembangunan infrastruktur di daerah 3T, meningkatkan pengawasan pengadaan Smart TV, dan melatih guru untuk mengintegrasikan nilai Pancasila dalam pembelajaran digital dan berasma. Dengan implementasi yang lebih baik, kedua program dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan inklusif dan berbasis Pancasila.

Efektivitas Program

Pendidikan di Indonesia selalu menjadi topik yang penuh dinamika. Negara ini memiliki cita-cita besar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Namun di sisi lain, fakta lapangan menunjukkan bahwa kualitas pendidikan belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita tersebut. Ketimpangan akses, rendahnya mutu pengajaran, lemahnya infrastruktur, serta terbatasnya tenaga pendidik berkualitas masih menjadi masalah yang membelit dunia pendidikan nasional hingga hari ini (tilaar, 2002).

Program-program baru yang dicanangkan pemerintahan saat ini, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, sejatinya lahir dari niat baik untuk memperbaiki

keadaan. Program tersebut diklaim sebagai langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, menekan angka stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Namun, pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan adalah, apakah program-program ini benar-benar menjawab akar persoalan pendidikan di Indonesia, atau justru masih bergerak di permukaan masalah?

Sebelum menilai program pemerintah, kita perlu memahami akar konflik pendidikan di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih sangat mencolok. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta, misalnya, mencapai 83,45, sedangkan di Nusa Tenggara Timur hanya 68,23 (BPS, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas belum bisa merata. Selain itu, laporan PISA 2022 juga memperlihatkan penurunan kemampuan literasi dan numerasi pelajar Indonesia dibanding tahun 2018. Rendahnya kemampuan dasar ini menandakan bahwa sistem pendidikan nasional belum sepenuhnya efektif dalam membentuk kemampuan berpikir kritis dan keterampilan abad ke-21 yang dibutuhkan dunia kerja modern.

Permasalahan lain yang tak kalah serius adalah relevansi pendidikan. Banyak lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang tidak terserap dunia kerja karena ketidaksesuaian antara kompetensi yang diajarkan dan kebutuhan industri. Akibatnya, pengangguran terdidik justru meningkat setiap tahun. Data BPS mencatat, per Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka dari lulusan diploma dan universitas mencapai 7,6 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Dari sini kita bisa melihat bahwa masalah utama pendidikan di Indonesia bukan hanya pada akses dan biaya, melainkan juga kualitas, pemerataan, dan relevansi dengan realitas sosial-ekonomi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintah saat ini. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, terutama di daerah rawan stunting dan kemiskinan. Ide dasarnya cukup sederhana namun penting: anak yang sehat dan cukup gizi akan belajar lebih baik (Kemendikbudristek, 2024). Namun, sejumlah kasus menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa laporan media nasional mencatat adanya kasus keracunan massal di beberapa daerah setelah siswa mengonsumsi makanan dari program MBG. Badan Gizi

Nasional (BGN) mengakui bahwa pengawasan di lapangan masih lemah dan rantai distribusi makanan belum terkendali dengan baik (DetikHealth, 2025). Masalah seperti ini menunjukkan bahwa kebijakan gizi sekolah bukan hanya soal niat, tetapi juga soal sistem dan tata kelola. Jika MBG dijalankan tanpa SOP ketat, audit kualitas, dan kolaborasi dengan ahli gizi daerah, maka tujuan mulianya bisa berbalik menjadi bencana kesehatan.

Program Sekolah Rakyat yang diperkenalkan pemerintahan saat ini sebenarnya membawa semangat mulia, membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan secara ekonomi. Konsepnya adalah sekolah tanpa biaya, dengan kurikulum fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pemerintah berharap program ini bisa menjadi solusi bagi anak-anak di wilayah marginal, pedesaan, atau korban putus sekolah. Namun, kritik muncul dari sejumlah kalangan akademisi. Beberapa menilai bahwa Sekolah Rakyat berpotensi tumpang tindih dengan sistem pendidikan formal yang sudah ada. Tanpa desain kurikulum yang jelas, standar akreditasi, dan kualitas pengajar yang memadai, program ini bisa menjadi “sekolah alternatif” yang justru menurunkan standar pendidikan nasional. Selain itu, jika Sekolah Rakyat tidak dibarengi dengan penguatan fasilitas, pengawasan, dan pelatihan guru, maka ia hanya akan menjadi simbol politik yang tidak menyentuh akar masalah pendidikan. Dalam konteks nilai Pancasila, hal ini menyimpang dari sila kedua dan kelima, yang menuntut keadilan dan kemanusiaan dalam sistem Pendidikan.

Penyaluran *Smart TV* ke sekolah-sekolah dasar dan menengah merupakan bagian dari kebijakan digitalisasi pendidikan yang diharapkan mampu memperluas akses informasi pembelajaran dan mendukung pembelajaran interaktif (Kominfo, 2024). Namun, efektivitas program ini masih menjadi tanda tanya besar. Banyak sekolah di daerah terpencil yang menerima perangkat Smart TV tetapi tidak memiliki jaringan internet stabil atau tenaga pendidik yang mampu mengoperasikan teknologi tersebut secara optimal. Pendidikan digital bukan hanya tentang perangkat, melainkan tentang kesiapan ekosistem, mulai dari pelatihan guru, kurikulum adaptif, hingga kesadaran etika digital. Jika aspek ini diabaikan, maka program Smart TV bisa berakhir seperti banyak proyek teknologi sebelumnya berjalan hanya di atas kertas dan berhenti di tumpukan laporan keberhasilan.

Pertanyaannya kemudian, apakah program-program besar ini benar-benar menjawab kebutuhan mendasar pendidikan Indonesia?, mungkin jika dilihat dari aspek tujuan moral dan

ideologis bisa dikatakan benar. Program tersebut berupaya mewujudkan amanat Pancasila dan UUD 1945 mengenai pemerataan akses dan peningkatan kualitas hidup rakyat melalui pendidikan dan gizi. Namun, dari segi implementasi dan urgensi struktural, jawabannya belum tentu positif.

Masalah pendidikan di Indonesia saat ini bukan semata-mata karena kurangnya program, melainkan karena lemahnya perencanaan jangka panjang, koordinasi antarinstansi, dan pengawasan mutu. Banyak kebijakan pendidikan lahir dari semangat politik, bukan hasil riset kebutuhan masyarakat. Seperti, perubahan kurikulum yang terlalu sering dan minim sosialisasi membuat guru serta siswa kebingungan menyesuaikan diri. Selain itu, permasalahan kesejahteraan guru, fasilitas belajar, dan ketimpangan digital di daerah-daerah tertinggal masih belum tersentuh serius. Menurut survei Kemdikbud (2023), sekitar 39 persen sekolah dasar di Indonesia masih kekurangan guru berkualifikasi S1, terutama di wilayah timur. Hal ini menunjukkan bahwa akar persoalan sebenarnya ada pada kualitas tenaga pendidik dan sarana dasar pendidikan, bukan hanya pada program baru yang bersifat karitatif. Program ini cenderung berorientasi kuantitatif berapa banyak yang mendapat manfaat daripada kualitatif, yakni seberapa besar dampaknya terhadap mutu pendidikan nasional.

Pendidikan dalam Pancasila bukan sekadar urusan administratif. Ia adalah sarana pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman, berilmu, berakhlak, dan berguna bagi sesama. Artinya, pendidikan tidak boleh dilihat sempit sebagai sumber pengetahuan, melainkan proses pembentukan karakter dan keadaban publik. Program pendidikan yang baik harus berpihak pada kemanusiaan, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan keadilan sosial. Dalam konteks inilah, MBG dan Sekolah Rakyat harus dimaknai ulang. Ia bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan dunia pendidikan untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik nyata. Pancasila menuntut keseimbangan antara moralitas dan kebijakan, antara idealisme dan realitas sosial. Pendidikan seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya.

Pemerintah perlu memperbaiki tata kelola, memastikan partisipasi masyarakat, meningkatkan kapasitas guru, dan menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pencitraan politik. Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang memberi sekolah dan makanan, melainkan tentang membangun manusia Indonesia yang beradab,

mandiri, dan berpikir kritis. Tanpa itu, semua program besar hanya akan menjadi slogan yang indah namun kosong makna.

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan hak dasar rakyat sekaligus tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Berbagai program pemerintah seperti *Makan Bergizi Gratis (MBG)*, *Sekolah Rakyat*, dan penyaluran *Smart TV* menunjukkan upaya konkret untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Namun, kebijakan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar seperti ketimpangan infrastruktur, rendahnya kualitas guru, lemahnya pengawasan, serta orientasi program yang lebih bersifat karitatif ketimbang struktural. Pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik dan fasilitas, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan keadilan sosial sesuai nilai Pancasila. Oleh karena itu, reformasi pendidikan perlu diarahkan pada perbaikan sistemik, mulai dari tata kelola, pemerataan mutu, hingga pemberdayaan masyarakat, agar pendidikan benar-benar menjadi sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar proyek politik jangka pendek.

REFERENSI

- Anton. (2025). *Pendidikan di wilayah 3T: Tantangan dan solusi akses sekolah di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Aryani, E. D., Fadjrin, N., Azzahro', T. A., & Fitriyono, R. A. (2022). *Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter. Pancasila Dalam Pendidikan Karakter*. Gema Keadilan. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16430>
- Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. (2025). *Laporan infrastruktur internet pendidikan*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. <https://bakti.kominfo.go.id>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2025). *Laporan awal evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah*. Jakarta: BPKP. <https://www.bpkp.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks pembangunan manusia (IPM) dan ketimpangan akses pendidikan 2024*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Data kemiskinan dan pendidikan 2025*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>

- Da Silva, O. H. F. (2021). *Pedagogy of the Oppressed Early Childhood: decolonizing Early Childhood Education with Paulo Freire*. Praxis Educativa <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.16.16588.040>.
- Gainau. (2025). *Mutu pendidikan nasional dan tantangannya di era globalisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzanwadi. (2025). Pengaruh penggunaan multimedia Smart TV terhadap minat belajar siswa. *Sosio Edukasi: Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan*, 7(1), 23–35. <https://ejournal.hamzanwadi.ac.id/index.php/sosedu/article/download/sosedu.v7i1.23725/pdf>
- Icha Saputri, A., Habibah, K., & Ash Sidqi, M. S. (2022). Kefektifan Merdeka Belajar Terhadap Wilayah 3T Dalam Upaya Peningkatan Pendidikan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Education for All: Media Informasi Ilmiah Bidang Pendidikan Luar Sekolah*. <https://doi.org/10.24114/jefa.v11i2.51706>
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Hidayat, M., & Pratama, A. (2025). *Efektivitas program Makan Bergizi Gratis terhadap prestasi akademik siswa di Indonesia*. Bandung: Pusat Kajian Gizi dan Pendidikan Nasional.
- Kadi, T., & Awwaliyah, R. (2017). *Inovasi Pendidikan: Upaya Penyelesaian Problematika Pendidikan Di Indonesia*. *Jurnal Islam Nusantara*. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v1i2.32>
- Kadi, T. (2020). *Problematika pendidikan di Indonesia: Refleksi kritis atas sistem nasional*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Laporan dampak gizi dan kehadiran siswa pasca program Makan Bergizi Gratis (MBG)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. <https://www.kemkes.go.id>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025). *Laporan resmi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis*. Jakarta: Kemenko PMK. <https://www.kemenkopmk.go.id>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Laporan anak putus sekolah 2024*. Jakarta: Kemendikbudristek. <https://www.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). *Evaluasi awal program Sekolah Rakyat dan Smart TV*. Jakarta: Kemendikbudristek. <https://www.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Laporan awal program Sekolah Rakyat 2025*. Jakarta: Kementerian Sosial RI. <https://kemensos.go.id>
- Komdigi. (2025). *Evaluasi program Smart TV 2025*. Jakarta: Komdigi.
- Lestari, P., Sunarto, S., & Cahyono, H. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Kelima Dalam Pembelajaran. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*. <https://doi.org/10.31571/sosial.v7i2.1880>

- Mindyasningrum, M. (2023). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. *Jurnal Waspada*, 5(2), 45–60. <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/waspada/article/download/540/405>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *PISA 2018 results: Combined executive summary*. Paris: OECD. <https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *PISA 2022 results: Learning during disruption*. Paris: OECD. <https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2022-results.htm>
- Sutono, A., & Wahyuni, S. (2023). Dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila di era modern. *Jurnal Education and Counseling*, 8(2), 123–135. <https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs/article/download/141/148>
- Torro, S., Irwansyah, I., & Aini, S. (2023). *Pengaruh Penggunaan Multimedia Smart Tv Terhadap Keaktifan Belajar Sosiologi Siswa Sma Negeri 3 Bulukumba*. Sosio Edukasi: Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan. <https://doi.org/10.29408/sosedu.v7i1.23725>